

Evaluasi Implementasi Arsitektur Walewangko pada Desain Fasad Bangunan Pemerintahan di Kota Manado

Jefferson Musa Gagola¹, Mario Lodeweik Lionar^{2*})

1, 2. Departemen Teknik Arsitektur dan Perancangan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: mario.lionar@ugm.ac.id

*) *Corresponding author*

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 28-04-2025
Disetujui 09-07-2025
Tersedia online 01-12-2025

Kata kunci:

Arsitektur Walewangko, fasad pemerintahan, identitas lokal, Kota Manado.

ABSTRAK

Arsitektur Walewangko merupakan warisan budaya Minahasa yang mencerminkan nilai sosial seperti keterbukaan, kesetaraan, dan musyawarah. Sebagai ibu kota Sulawesi Utara yang merupakan wilayah persebaran utama Suku Minahasa, Kota Manado seharusnya menjadi representasi kuat dari arsitektur lokal tersebut. Namun, modernisasi dan tekanan terhadap efisiensi ruang telah mendorong pergeseran desain bangunan pemerintahan ke arah gaya kontemporer yang minim unsur budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana elemen arsitektur Walewangko diterapkan pada fasad bangunan pemerintahan di Kota Manado dan mengidentifikasi persepsi para pemangku kebijakan terhadap kondisi tersebut. Dengan metode campuran (*mixed-methods*) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis sepuluh bangunan pemerintahan lintas tingkatan administrasi serta melibatkan studi literatur, observasi kuantitatif fasad, dan wawancara semi-terstruktur. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan yang dibangun setelah 2014 tidak lagi mengakomodasi elemen arsitektur Walewangko. Temuan ini memperlihatkan terpinggirkannya identitas lokal dalam desain arsitektur pemerintahan, selaras dengan tren nasional. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi kembali nilai-nilai lokal melalui pendekatan regionalisme arsitektur dalam pembangunan kontemporer.

Keywords:

Architecture of Walewangko, government façade, local identity, Manado City.

ABSTRACT

Title: Evaluation of the Implementation of Walewangko Architecture in the Façade Design of Government Buildings in the City of Manado

The Architecture of Walewangko is a cultural heritage of the Minahasan people, symbolizing values such as openness, equality, and consensus. As the capital of North Sulawesi and the core region of the Minahasan ethnic group, Manado City is expected to reflect this local identity through its public architecture. However, modernization and the demand for functional efficiency have led to a shift toward contemporary design, often neglecting traditional elements. This study aims to evaluate the implementation of Walewangko architectural elements in the facades of government buildings in Manado and to understand policymakers' perceptions of this trend. Using a mixed-methods approach combining quantitative and qualitative strategies, the research examines 10 government buildings across administrative levels through facade measurements, content analysis, and semi-structured interviews. The findings reveal that buildings constructed after 2014 have largely abandoned Walewangko elements, highlighting a diminishing presence of local identity in public architecture. These results align with broader national trends and underscore the urgency of reintegrating local values through the lens of architectural regionalism in contemporary design practices.

Pendahuluan

Arsitektur tradisional merupakan wujud konkret dari hasil kebudayaan suatu masyarakat yang berkembang seiring waktu berdasarkan kebutuhan, nilai, kepercayaan, serta kondisi geografis setempat (Abdillah & Santri, 2025). Setiap bentuk, tata letak, dan material yang digunakan memiliki makna simbolik yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal suatu daerah (Syahrial & Saliya, 2021). Oleh karena itu, arsitektur tradisional bukan sekadar bentuk fisik bangunan, tetapi juga representasi dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi arsitektur tradisional mulai terpinggirkan dan secara perlahan ditinggalkan, yang merupakan dampak dari modernisasi. Fenomena ini terjadi secara umum di berbagai daerah, serta tampak nyata pada daerah yang memiliki latar budaya dari Suku Minahasa yaitu Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini terletak dalam wilayah persebaran Suku Minahasa, suku terbesar di Sulawesi Utara yang mendiami sebagian besar wilayah provinsi tersebut. Secara historis, wilayah Kota Manado merupakan bagian dari kawasan Minahasa yang kemudian mengalami pengembangan dan pemekaran wilayah hingga ditetapkan sebagai kota secara administratif. Pada kota ini terdapat pusat-pusat pemerintahan yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga perwakilan instansi pemerintah pusat di daerah. Fungsi strategis ini menjadikan Kota Manado sebagai titik sentral dalam sistem birokrasi, pelayanan publik, dan titik penting dalam representasi budaya Minahasa termasuk arsitektur tradisionalnya yaitu Walewangko. Dalam

konteks inilah, penting untuk meninjau kembali pendekatan regionalisme arsitektur sebagai solusi terhadap ketimpangan antara modernisasi dan pelestarian identitas lokal. Walewangko merupakan rumah adat Suku Minahasa yang secara simbolis mencerminkan nilai-nilai sosial seperti kesetaraan, musyawarah, dan keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat (R. M. P. Kolibu & Sachari, 2018).

Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mempertahankan eksistensi warisan budaya lokal adalah dengan mengimplementasikan unsur-unsur arsitektur tradisional ke dalam desain bangunan kontemporer (Syahrial & Saliya, 2021).

Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog antara nilai-nilai arsitektur masa lalu dan kebutuhan fungsional masa kini, tanpa mengorbankan identitas budaya yang melekat pada suatu kawasan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip regionalisme arsitektur, yaitu sebuah gerakan dalam arsitektur modern yang menekankan pentingnya penyesuaian desain terhadap iklim, budaya, teknologi, dan identitas lokal sebagai respons terhadap dominasi arsitektur internasional yang seragam. Wujud konkret dari strategi tersebut adalah penerapan elemen arsitektur tradisional dalam desain fasilitas publik, khususnya bangunan kantor pemerintahan.

Sebagai pusat interaksi masyarakat, bangunan pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk citra kawasan dan merepresentasikan identitas lokal (Fanani & Aqli, 2021). Dalam konteks Arsitektur Minahasa, implementasi unsur-unsur Walewangko pada fasad bangunan dapat menjadi pendekatan yang efektif. Fasad memiliki kontribusi visual yang kuat dalam menciptakan

karakter arsitektural suatu kota (Putra, 2021), sehingga penerapan elemen-elemen Walewangko akan memperkuat citra lokal serta memungkinkan arsitektur tradisional tetap hidup berdampingan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai filosofis dan estetikanya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bangunan-bangunan pemerintahan di Kota Manado semakin beralih ke bentuk desain kontemporer dan secara umum tidak lagi menerapkan elemen-elemen arsitektur Walewangko, termasuk pada aspek fasad. Kondisi ini terjadi pada banyak bangunan aset pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota. Kota Manado memiliki bangunan pemerintahan yang mencakup fasilitas pada tiga tingkat administrasi, yakni kota, provinsi, dan instansi vertikal pemerintah pusat. Pembangunan bangunan pemerintahan kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Manado, sementara gedung-gedung milik pemerintah provinsi dirancang dan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun bangunan instansi vertikal, seperti kantor BPK, Kanwil Pajak, dan Kejaksaan Tinggi, dibangun oleh kementerian atau lembaga negara di tingkat pusat, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat. Meskipun demikian, seluruh bangunan instansi pemerintah pusat tetap wajib dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (2021) yang mewajibkan kesesuaian desain dengan budaya dan lingkungan setempat (Pasal 16), serta (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, 2006), yang menekankan

pentingnya penerapan nilai lokal dan estetika kawasan dalam desain bangunan publik. Selain itu, peraturan daerah seperti RTRW Kota Manado menjadi acuan yang memperkuat pentingnya penyesuaian arsitektural terhadap identitas budaya Minahasa dalam konteks pembangunan fasilitas pemerintahan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi fasad arsitektur Walewangko pada bangunan kontemporer saat ini khususnya bangunan pemerintahan yang ada di Kota Manado, serta mengidentifikasi persepsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemrakarsa pembangunan terhadap penerapan fasad arsitektur tradisional Minahasa dalam desain bangunannya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelestarian Walewangko sebagai arsitektur tradisional Minahasa serta mendorong penerapannya dalam rancangan bangunan kontemporer, khususnya bangunan pemerintahan di Kota Manado.

Arsitektur Walewangko

Menurut Karundeng et al. (2022), elemen-elemen utama yang membentuk fasad bangunan Walewangko meliputi penggunaan atap yang mengombinasikan bentuk perisai dan pelana, serta kehadiran bukaan jendela atau ventilasi pada bagian depan dan belakang atap. Selain itu, bangunan Walewangko umumnya berbentuk rumah panggung dengan teras yang menonjol pada bagian badan bangunan. Dua buah tangga diletakkan di bagian depan, memperkuat simetri dan aksesibilitas. Struktur bangunan juga ditandai oleh kolom-kolom yang terekspos, lengkap dengan ukiran khas pada bagian pangkal kolom dan ujung balok struktur, yang mencerminkan nilai

estetika dan filosofi budaya Minahasa (Wangkai, 2023).

Sedangkan Tumenggung dalam Kolibu et al. (2018) menjelaskan bahwa arsitektur rumah tradisional Suku Minahasa secara fisik terdiri atas tiga bagian utama secara vertikal, yaitu atap (*soldor/loteng*), badan (*ale bola*), dan kolong. Atap rumah berbentuk gabungan limasan dan pelana yang awalnya menggunakan daun rumbia (*Metroxylon rumbiana*) sebagai material penutup. Struktur atap ditopang oleh tiang utama (tiang raja) yang penempatannya tidak boleh berada tepat di atas ambang pintu (Rogi & Siswanto, 2009).

Badan rumah, yang merupakan bagian utama secara fungsional, terdiri dari lantai dan dinding kayu yang disusun dengan memperhatikan arah pertumbuhan serat kayu yaitu pangkal di bawah dan ujung di atas untuk posisi vertikal. Bukaan seperti pintu dan jendela disusun sejajar dalam satu poros dan jumlah jendela umumnya 4-6 unit. Pada sisi depan ruang depan (*setup*) terdapat 2 unit tangga yang diletakan saling berhadapan dengan jumlah anak tangganya berkisar antara 7, 9, atau 13. Susunan ruang dalam badan rumah terdiri atas *setup* (beranda depan), *leloangan* (ruang tamu), *pores/lesar* (ruang tengah), dan *sekey* (kamar-kamar), dengan penyekatan dari papan kayu yang membentuk zonasi fungsional (Kolibu & Sachari, 2018; Waleleng, 2016).

Kolong rumah merupakan ruang kosong di bawah lantai rumah panggung, ditopang oleh 16-18 tiang dari kayu yang berdiri di atas batu (*watulanei*) untuk mencegah pelapukan serta dimanfaatkan untuk menyimpan peralatan kerja dan memelihara ternak (Kolibu et al., 2018).

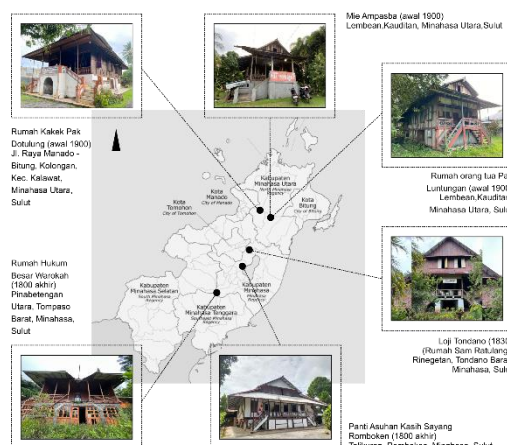


Gambar 1. Walewangko di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta

Sumber:

https://tamanmini.com/taman_jelajah_indonesia/anjungan/anjungan-sulawesi-utara/, diakses 23 April 2025

Untuk melengkapi literatur mengenai tipologi fasad tersebut, dilakukan observasi lapangan terhadap bangunan-bangunan Walewangko yang dibangun sejak awal tahun 1900 dan masih tersisa di wilayah Minawerot, Kabupaten Minahasa Utara, serta di wilayah Tondano, Kabupaten Minahasa, dan beberapa lokasi lainnya yang dikenal masih menjaga dan melestarikan bangunan Walewangko yang terlampir pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi observasi di wilayah persebaran Suku Minahasa

Sumber: Olahan penulis, 2025

Pada Gambar 3 dapat dilihat sebagian bangunan memang telah mengalami penambahan dan modifikasi pada beberapa bagiannya, tetapi masih

mempertahankan sebagian besar keaslian elemen arsitektur Walewangko. Meskipun demikian, pelaksanaan penelitian lapangan lanjutan masih dimungkinkan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai variasi dan persebaran tipologis arsitektur Walewangko.



Gambar 3. Walewangko di beberapa wilayah Minahasa yang masih tersisa

Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Hasil observasi kemudian dikomparasikan dengan literatur yang ada, dan dirumuskan menjadi tipologi fasad arsitektur Walewangko sebagaimana terlampir pada Tabel 1. Tipologi ini dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan sejauh mana penerapan arsitektur Walewangko pada bangunan-bangunan pemerintah di Kota Manado.

Tabel 1. Rumusan Tipologi Fasad Arsitektur Minahasa

Atap bangunan (<i>loteng</i>) menggunakan atap kombinasi limasan/perisai dan pelana, dengan bukaan jendela atau ventilasi pada fasad depan dan belakang atap.	Proporsi	Perbandingan bagian besar dan kecil 1:1 antar kombinasi atap
	Kemiringan	Kemiringan atap rata-rata untuk bagian besar 35° bagian kecil 17°
	Material	Aslinya menggunakan Rumbia (<i>Metroxylon rumbiana</i>)
Badan bangunan (<i>ale bola</i>) memiliki teras pada bagian depan badan bangunan, dengan penggunaan kolom struktur yang terekspos serta dua tangga di bagian depan. Elemen dekoratif ditampilkan melalui ukiran pada kolom panggung dan ujung balok struktur.	Proporsi	Perbandingan pada fasad 1:1 antara teras dan badan bangunan yang tertutup
	Material	Aslinya menggunakan kayu, posisinya harus terusun bertemuan antara pangkal dan ujung.
	Tangga	Disusun sejajar antara bagian depan dan belakang serta kiri dan kanan (bagian depan).
	Jendela	Jumlah jendela berkisar di antara 4 sampai 6 buah, yang berukuran 60 x 90 cm.
Bawah (<i>kolong</i>) struktur bangunan menggunakan kolom yang terekspos, dengan batu sebagai alas tiang untuk mencegah pelapukan akibat kontak langsung dengan tanah.	Ukiran	Ukiran berupa kekayaan alam Minahasa
	Kolom struktur	Berjumlah 16-18 yang dipasang membujur dan memanjang dan terbuat dari Kayu.
	Material	Kayu didirikan di atas batu (<i>watulanei</i>)

Sumber: Olahan penulis, 2025

Regionalisme

Menurut Wondoamiseno dalam Lionar (2021), regionalisme merupakan sebuah pendekatan arsitektur yang menekankan variasi dari arsitektur modern dengan memperhatikan karakteristik regional seperti iklim lokal, budaya lokal, dan teknologi lokal. Hakikat regionalisme adalah menggunakan alat dan teknologi modern untuk menghormati konteks lokal dan melestarikan nilai masa lalu tanpa meniru arsitektur tradisional secara literal (Curtis, 1986; Lionar, 2021; Ricoeur, 1965).

Özkan dalam Lionar (2021) membagi pendekatan dalam regionalisme arsitektur ke dalam dua kategori utama: Vernakularisme dan Regionalisme Modern. Vernakularisme berakar pada tradisi bangunan rakyat, yang terbagi menjadi dua, yakni Vernakularisme Konservatif, yang mereplikasi bentuk, material, dan teknik tradisional secara utuh; serta Vernakularisme Interpretatif atau Neo-Vernakularisme, yang mengadaptasi bentuk vernakular untuk fungsi modern menggunakan material baru. Sementara itu, Regionalisme Modern mengambil inspirasi tidak hanya dari arsitektur vernakular, tetapi juga arsitektur monumental, dan terbagi menjadi Regionalisme Konkret yang mereplikasi elemen masa lalu dengan teknologi modern sambil menjaga nilai simboliknya dan Regionalisme Abstrak, yang mengekspresikan nilai lokal melalui elemen-elemen abstrak seperti proporsi, ruang, dan pencahayaan tanpa meniru bentuk fisik tradisional. Pendekatan ini menekankan pentingnya identitas lokal dalam arsitektur modern secara kontekstual dan kritis.

Metode

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed*

methods) untuk mengevaluasi implementasi arsitektur tradisional Minahasa (Walewangko) pada bangunan kontemporer di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengambilan data berbeda untuk menjawab ketiga tujuannya. Teknik Pengambilan dan pengolahan data pertama dilakukan dengan pengukuran kuantitatif luas fasad, khususnya bagian depan bangunan secara keseluruhan dan dibandingkan dengan luas area yang teridentifikasi sebagai elemen-elemen fasad Walewangko. Dengan demikian, ditemukan perbandingan persentase karakter tradisional dan kontemporer pada bangunan dari tahun ke tahun.



Gambar 4. Kantor Pemerintahan di wilayah Kota Manado

Sumber: Dokumentasi penulis, 2025

Teknik pengambilan dan pengolahan data kedua yaitu dengan konten analisis isi sederhana. Tahapan yang dilakukan yakni mengumpulkan sejumlah artikel

di internet dan jurnal yang berkaitan dengan bangunan-bangunan pemerintahan di kota Manado. Kemudian berusaha merumuskan bagaimana persepsi masyarakat dominan mengenai penerapan Arsitektur Minahasa pada bangunan pemerintahan saat ini.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang ketiga dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari kalangan pejabat pemerintahan sebagai pemangku kepentingan yang dirinci (Tabel 2). Dalam konteks ini narasumber tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan teknis pembangunan kantor-kantor tersebut, namun menduduki posisi strategis dan dapat memengaruhi keputusan dalam bidang kebudayaan di institusi pemerintah, dengan arsitektur menjadi salah satu elemen penting dalam integrasi nilai-nilai budaya lokal. Wawancara menggunakan panduan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3, dengan tujuan merumuskan persepsi pemerintah terhadap penerapan Arsitektur Minahasa pada bangunan pemerintahan saat ini.

Tabel 2. Daftar narasumber tokoh pemerintahan di wilayah Kota Manado

Partisipan	Jabatan
Partisipan 1	Kepala Subbagian (Kasub) Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Partisipan 2	Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Sulawesi Utara
Partisipan 3	Kepala Biro (Karo) Perbatasan Sulut
Partisipan 4	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Manado
Partisipan 5	Asisten Perekonomian Pembangunan Kota Manado

Sumber: Olahan penulis, 2025

Tabel 3. Daftar pertanyaan terkait penerapan arsitektur Walewangko

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah terdapat bangunan pemerintahan yang dibangun pada rentang tahun 2020 hingga 2025 di Kota Manado?
2	Apakah saat ini terdapat proyek pembangunan gedung pemerintahan yang sedang berlangsung?
3	Apa saja unsur-unsur arsitektur tradisional yang Anda ketahui pernah atau masih diterapkan pada bangunan pemerintahan di Kota Manado? Jelaskan.
4	Menurut Anda, apakah terdapat bentuk fasad bangunan pemerintahan yang terinspirasi dari arsitektur tradisional Minahasa? Jika ya, mohon sebutkan nama bangunannya serta bagian fasad mana saja yang menampilkan unsur tersebut.
5	Saat ini, tampak adanya kecenderungan bangunan pemerintahan bertransformasi ke arah desain kontemporer tanpa mengadopsi unsur arsitektur tradisional. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama dari perubahan orientasi desain ini?
6	Pertanyaan-pertanyaan lanjutan akan disesuaikan dengan jawaban yang diberikan, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam alasan utama dibalik fenomena pergeseran desain tersebut.

Sumber: Olahan penulis, 2025

Hasil dari ketiga metode pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis secara komparatif untuk memperoleh temuan utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan triangulasi data melalui validasi temuan persepsi dengan membandingkannya terhadap hasil-hasil dari penelitian atau artikel jurnal sejenis.

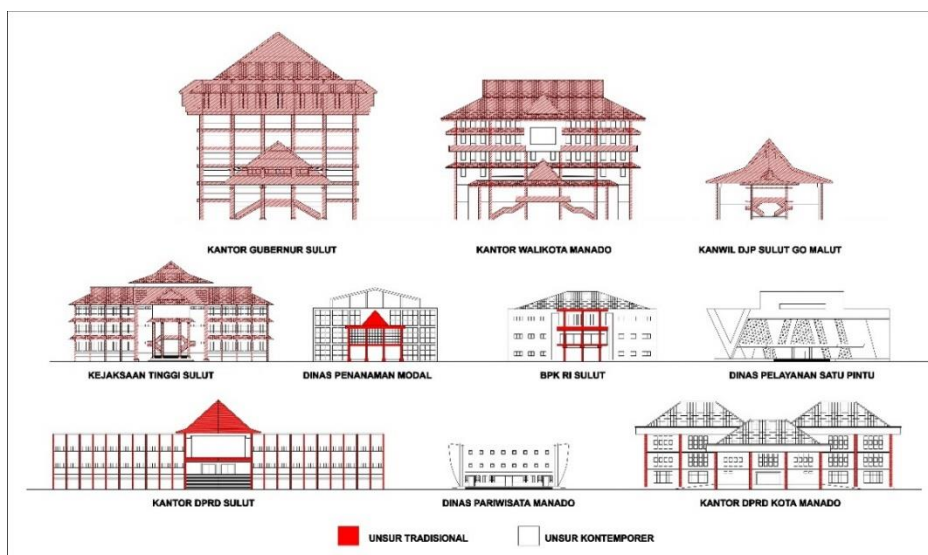
Hasil dan Pembahasan

Analisis Objek Studi Kasus

Objek studi kasus dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh bangunan

pemerintahan yang berlokasi di wilayah Kota Manado dengan klasifikasi pada level pemerintah kota, yaitu Kantor Wali Kota Manado, Kantor Dinas Pariwisata Kota Manado, dan DPRD Kota Manado. Kemudian pada level pemerintah provinsi yaitu Kantor Gubernur, Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP Sulawesi Utara, Dinas Pelayanan Satu Pintu, dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta pada level instansi vertikal pemerintah pusat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor BPK RI, dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pemilihan kesepuluh bangunan tersebut didasarkan pada pertimbangan lokasi yang berada di pusat kota serta posisinya dalam kawasan

strategis yang ramai aktivitas. Selain itu, seluruh bangunan tersebut merupakan fasilitas pelayanan publik yang memiliki intensitas kunjungan tinggi, sehingga dinilai representatif dalam menggambarkan peran arsitektur pemerintahan dalam membentuk citra kawasan dan persepsi masyarakat terhadap penerapan unsur budaya lokal dalam desain arsitektural. Setelah penentuan bangunan pemerintahan, dilakukan analisis melalui pengukuran kuantitatif luas fasad khususnya bagian depan bangunan secara keseluruhan dan dibandingkan dengan luas area yang teridentifikasi sebagai elemen-elemen fasad Walewangko sebagai berikut.



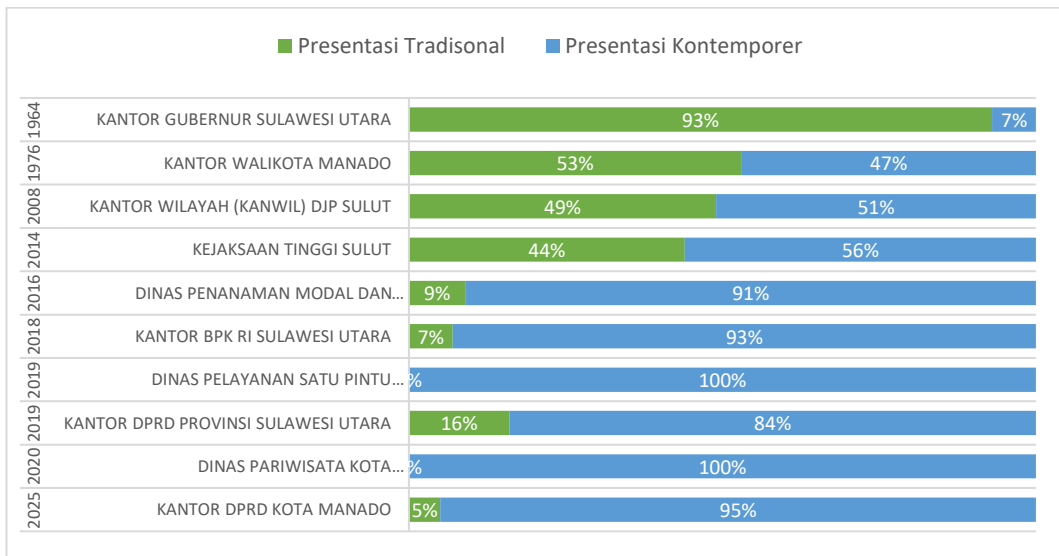
Gambar 5. Gambaran fasad depan bangunan Kantor Pemerintah
Sumber: Olahan penulis, 2025

Tabel 4. Persentase perubahan fasad bangunan amatan yang dikomparasi dengan *timeline*

Tahun Pembangunan	Nama Bangunan	Total Luas Fasad (m ²)	Luas Unsur Tradisional (m ²)	Luas Unsur Kontemporer (m ²)	Presentasi Tradisional	Presentasi Kontemporer
1964	Kantor Gubernur Sulawesi Utara	1370	1277	93	93%	7%
1976	Kantor Walikota Manado	1242	654	588	53%	47%
2008	Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulawesi Utara	314	153	161	49%	51%
2014	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	794	347	447	44%	56%
2016	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara	414	39	375	9%	91%

2018	Kantor BPK RI Sulawesi Utara	484	34	450	7%	93%
2019	Dinas Pelayanan Satu Pintu Sulut	556	0	556	0%	100%
2019	Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara	1824	289	1535	16%	84%
2020	Dinas Pariwisata Kota Manado	258	0	258	0%	100%
2025	Kantor DPRD Kota Manado	1020	49	971	5%	95%

Sumber: Hasil olahan penulis, 2025



Gambar 6. Grafik diagram persentase perubahan pada fasad bangunan amatan yang dikomparasi dengan *timeline*

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya kecenderungan perbedaan penerapan unsur fasad tradisional Walewangko pada bangunan pemerintahan di Kota Manado yang dibedakan berdasarkan periode pembangunannya. Bangunan-bangunan yang dibangun pada tahun 2014 dan sebelumnya umumnya masih mempertahankan sebagian besar elemen fasad Walewangko, seperti bentuk atap, teras, dan struktur panggung, meskipun dalam bentuk yang telah disesuaikan secara kontemporer. Sebaliknya, bangunan yang didirikan setelah tahun 2014 menunjukkan kecenderungan tidak lagi mengakomodasi unsur fasad Walewangko dalam desain fasadnya. Selain itu, dari seluruh elemen fasad

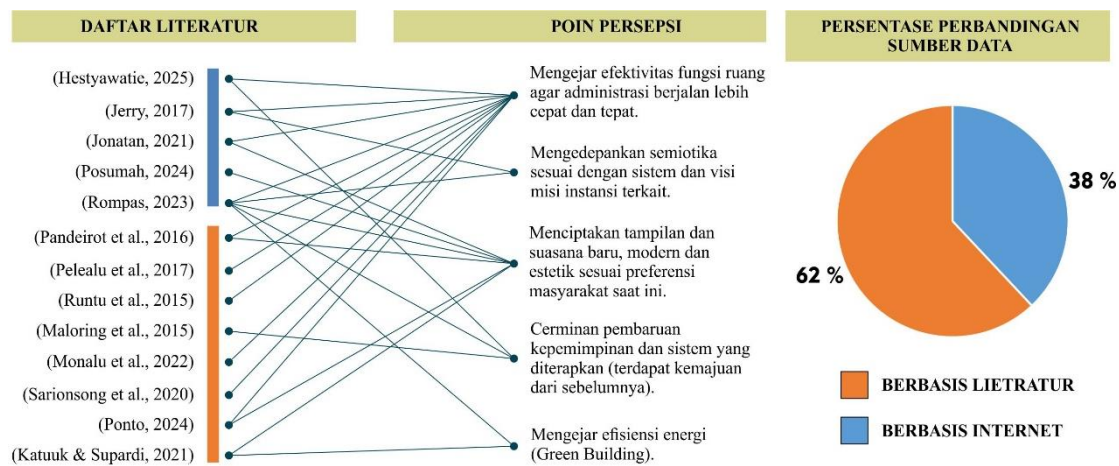
Walewangko yang diidentifikasi, elemen berupa ukiran pada bagian kolom panggung dan ujung balok struktur sama sekali tidak ditemukan pada desain fasad bangunan.

Berkaca pada teori regionalisme arsitektur yang merupakan pendekatan dalam penerapan unsur lokalitas pada bangunan; cara penerapan unsur arsitektur tradisional Minahasa pada bangunan pemerintahan ini termasuk ke dalam bagian regionalisme modern, khususnya regionalisme konkret dengan menggunakan ekspresi fisik dari arsitektur masa lalu, namun dengan teknologi dan material baru dan fokus pada nilai simbolik dan spiritual yang diwariskan.

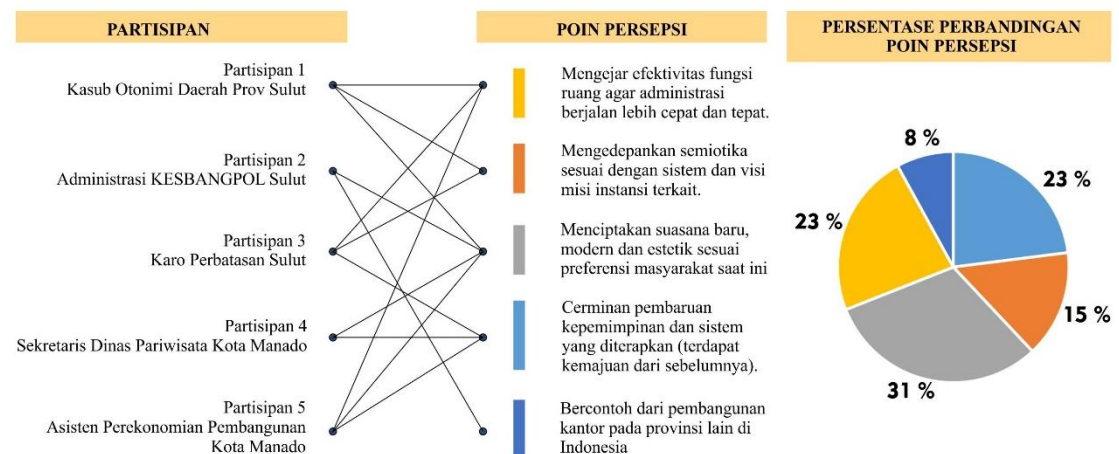
Identifikasi Persepsi Pengguna

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan adanya penurunan minat dari pihak pemerintah dalam mengaplikasikan unsur fasad arsitektur tradisional Minahasa pada bangunan kontemporer, khususnya bangunan pemerintahan di Kota Manado. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi desain yang secara bertahap menjauh dari nilai-nilai arsitektur tradisional Minahasa, baik dari segi bentuk, simbolik, maupun ekspresi budaya. Untuk memahami lebih dalam penyebab terjadinya pergeseran tersebut, dilakukan proses identifikasi melalui

analisis isi sederhana terhadap sejumlah artikel di internet dan jurnal yang relevan dan berkaitan dengan bangunan pemerintahan di Kota Manado. Hasil analisis ini diperoleh dengan mengekstraksi poin-poin utama mengenai persepsi dari setiap artikel, yang disajikan pada Gambar 7. Selain itu, untuk menggali persepsi dari pihak pemerintah, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari kalangan pejabat pemerintahan sebagai pemangku kepentingan. Hasil wawancara kemudian diekstraksi dan disajikan pada Gambar 8 sebagai berikut.



Gambar 7. Ekstraksi poin-poin persepsi masyarakat melalui literatur
 Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025



Gambar 8. Ekstraksi poin-poin persepsi Pemerintah melalui wawancara
 Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2025

Hasil analisis terhadap data persepsi masyarakat sebagai pengguna eksternal dan wawancara dengan pemangku kebijakan pemerintahan menunjukkan menurunnya penerapan elemen arsitektur tradisional Minahasa, khususnya pada fasad Walewangko, dalam bangunan pemerintahan di Kota Manado disebabkan oleh sejumlah faktor strategis dan perseptual. Alasan utama yang mengemuka adalah orientasi terhadap efektivitas fungsi ruang dalam mendukung performa administrasi yang cepat dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik. Desain bangunan yang mengadopsi pendekatan kontemporer dinilai lebih mampu mengakomodasi kebutuhan fungsional tersebut serta memperkuat citra kelembagaan yang efisien. Secara visual, fasad bangunan pemerintahan juga mengalami transformasi signifikan. Elemen-elemen arsitektur tradisional Walewangko semakin jarang diaplikasikan karena dianggap kurang relevan dengan representasi estetika kontemporer yang diinginkan. Selain pertimbangan fungsional dan visual, pemilihan desain fasad juga dipengaruhi oleh preferensi estetika pemimpin yang sedang menjabat, serta pertimbangan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Analisis terhadap sepuluh objek studi bangunan pemerintahan di Kota Manado menunjukkan pola penerapan unsur Arsitektur Minahasa pada bangunan kontemporer tersebut tergolong kedalam jenis pendekatan regionalisme konkret dengan menggunakan ekspresi fisik dari arsitektur masa lalu yang dipadukan dengan material saat ini. Di satu sisi, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam penerapan elemen fasad arsitektur Walewangko, terutama pada bangunan yang dibangun setelah tahun 2014, yang mayoritas tidak

lagi mengakomodasi unsur-unsur tradisional. Pola ini sejalan dengan hasil identifikasi persepsi pengguna, baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan, yang mengindikasikan bahwa menurunnya penggunaan elemen Arsitektur Minahasa dipengaruhi oleh orientasi terhadap efisiensi fungsi ruang, citra kelembagaan yang modern, serta preferensi visual yang lebih kontemporer.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Andriansyah (2024) dalam artikelnya “Pengaruh Modernisasi Pada Arsitektur Tradisional”, Nisa & Zahra (2025) dalam artikelnya “Transformasi Arsitektur Tradisional ke Arsitektur Modern di Lingkungan Perkotaan”, serta dalam penelitian Rianti (2021) dalam artikelnya “Kearifan Lokal pada Interior dan Arsitektur Kantor Pemerintahan sebagai Identitas Daerah” yang semuanya menunjukkan adanya penurunan penerapan elemen arsitektur tradisional pada bangunan modern di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga penelitian tersebut menyoroti bahwa modernisasi dan tuntutan efisiensi ruang menyebabkan desain bangunan termasuk kantor pemerintahan lebih mengutamakan gaya minimalis dan material modern, sehingga unsur budaya lokal hanya diadaptasi sebagian atau bahkan diabaikan. Kondisi ini menegaskan bahwa penurunan penggunaan elemen arsitektur tradisional, seperti yang terjadi pada fasad Walewangko di Kota Manado, merupakan bagian dari kecenderungan yang lebih luas secara nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi penurunan signifikan dalam penerapan elemen fasad arsitektur Walewangko pada bangunan pemerintahan di Kota Manado,

khususnya pada bangunan yang dibangun setelah tahun 2014. Analisis menunjukkan bahwa transformasi desain mengarah pada dominasi gaya kontemporer yang mengabaikan nilai-nilai simbolik dan karakter lokal Minahasa. Pendekatan yang digunakan sebagian besar termasuk dalam kategori regionalisme konkret, yaitu mengadaptasi bentuk tradisional secara fisik dengan material dan teknologi modern. Melalui wawancara dan identifikasi persepsi pengguna, ditemukan bahwa orientasi terhadap efisiensi fungsi ruang, citra kelembagaan modern, serta selera estetika kepemimpinan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran ini. Temuan ini sejalan dengan kecenderungan nasional di mana arsitektur tradisional mulai terpinggirkan dalam desain bangunan publik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk mengintegrasikan kembali elemen arsitektur lokal, khususnya Walewangko, dalam desain bangunan pemerintahan secara berkelanjutan dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Abdillah, B., & Santri, T. (2025). Kajian Arsitektur Tradisional Sunda pada Desain Teras Seni Budaya Sunda Cibiru Bandung. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 9(01), 19–34.
<https://doi.org/10.36040/pawon.v9i01.6221>
- Andriansyah, M. D. (2024). Pengaruh modernisasi pada arsitektur tradisional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), 1–20.
- Curtis, W. J. R. (1986). Towards an Authentic Regionalism. *Mimar*, 19: *Architecture in Development*, 24–31.
- Fanani, M. Z., & Aqli, W. (2021). Kajian kearifan lokal pada bangunan Kantor Pemerintahan Balaikota Depok. *Jurnal Arsitektur Purwarupa*, 5(1).
- Karundeng, R. C., Taroreh, R. W., Lapong, B. M., Wilar, L. A., Wajong, J. R., Tiwow, G. A. B., & Mokokrowu, H. R. (2022). Filosofi Wale, Foso Tumo'tol Hingga Rumamba. In R. C. Karundeng (Ed.), *Minahasa dalam Ingatan dan Tradisi* (pp. 30–40). Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT).
- Kolibu, R. M. P., & Sachari, A. (2018). Rumah Tradisional Minahasa; Perubahan Bentuk dan Fungsi Ruang. *Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial (SNDS)*, 225–233.
- Kolibu, S. I. I., Matheosz, J. N., & Mulianti, T. (2018). Arsitektur Rumah Adat Minahasa di Kelurahan Woloan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 11(22), 1–6.
- Lionar, M. L. (2021). *Fraktal Boyuta Dayalı Çok Katmanlı Bir Analiz: Eldem ve Doshi Mimarlığı* [Dissertation]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Nisa, F. K., & Zahra, N. (2025). Transformasi Arsitektur Tradisional ke Arsitektur Modern di Lingkungan Perkotaan. *Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain*, 2(1), 77–83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/realisasi.v2i1.454>
- Özkan, S. (1989). Regionalism within Modernism. In I. Serageldin (Ed.),

- Space for Freedom* (pp. 279–282). Butterworth Architecture.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Pub. L. No. 29 (2006).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pub. L. No. 16 (2021).
- Putra, I. D. G. A. D. (2021). Layout dan Arsitektur Puri, di antara Politik Kekuasaan dan Identitas Budaya. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 5(2), 137–150.
<https://doi.org/10.36040/pawon.v5i2.3549>
- Rianti, M. R. (2021). *Kearifan Lokal pada Interior dan Arsitektur Kantor Pemerintahan sebagai Identitas Daerah*. Perpustakaan ISI Yogyakarta.
- Ricoeur, P. (1965). Universal civilization and national cultures. In *History and truth*.
- Rogi, O. H. A., & Siswanto, W. (2009). Arsitektur Rumah Tradisional di Minahasa. *Ekoton*, 9(1).
- Syahrial, P., & Saliya, Y. (2021). Implementation of Traditional Balinese Architecture Concept in Maya Building Sanur, Bali (DCM). *RISA (Riset Manajemen)*, 05(April).
- Waleleng, G. J. (2016). Makna Simbol Pada Rumah Adat Etnik Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(20), 161–178.
- Wangkai, R. K. (2023). *Wale dan Harmoni Kehidupan*. Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur (PUKKAT).
- Wondoamiseno, R. (1991). *Regionalisme dalam arsitektur Indonesia: sebuah harapan*. Yayasan Rupadatu.